

ABSTRAK

Safira Maharani (01656220029)

KEPASTIAN HUKUM AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ELEKTRONIK DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2024.

Kemajuan teknologi informasi yang pesat telah secara signifikan mentransformasi berbagai proses hukum, termasuk pembuatan akta otentik oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Implementasi akta elektronik berdasarkan peraturan terbaru menghadirkan peluang dan tantangan dalam kepastian hukum dan keamanan dokumen. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dari akta peralihan hak tanah elektronik yang dibuat oleh PPAT di bawah kerangka peraturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 bersamaan dengan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja serta perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengadopsi pendekatan undang – undang dan konseptual untuk menelaah undang-undang dan doktrin yang relevan. Penelitian ini berbasis studi kepustakaan, mengambil data secara luas dari dokumen-dokumen hukum sekunder, termasuk teks hukum, doktrin, dan penelitian sebelumnya. Hasil studi menunjukkan bahwa kerangka perundang-undangan terbaru telah memfasilitasi transformasi digital prosedur akta tanah, memberikan kedudukan hukum yang sama untuk akta elektronik seperti akta konvensional berbasis kertas, asalkan memenuhi syarat autentisitas dan akurasi yang ditetapkan. Manfaat utama yang diidentifikasi meliputi efisiensi proses, peningkatan transparansi, dan peningkatan keamanan dokumen karena tanda tangan digital dan enkripsi. Meskipun ada kemajuan, beberapa tantangan masih berlangsung, termasuk kebutuhan akan infrastruktur TI yang kuat, perlindungan data yang ketat, dan pendidikan serta pelatihan ekstensif untuk pemangku kepentingan agar dapat beradaptasi dengan sistem elektronik. Pengadopsian sistem elektronik untuk pembuatan akta PPAT di bawah kerangka hukum yang diteliti menawarkan peningkatan efisiensi dan keamanan tetapi memerlukan penyesuaian berkelanjutan dan penguatan regulasi untuk memastikan kepastian hukum penuh dan kepercayaan publik.

References: 75 (1983-2023)

Kata Kunci: akta peralihan hak tanah elektronik, PPAT, transformasi digital.

ABSTRACT

Safira Maharani (01656220029)

LEGAL CERTAINTY OF OFFICIAL ACTS FOR ELECTRONIC LAND DEEDS UNDER LAW NO. 6 OF 2023 AND LAW NO. 1 OF 2024.

The rapid advancement of information technology has significantly transformed various legal processes, including the creation of authentic acts by Public Notaries for land transfer (PPAT). The implementation of electronic acts under recent legislation poses both opportunities and challenges in legal certainty and document security. This study aims to analyze the legal certainty of electronic land transfer acts made by PPATs under the regulatory frameworks of Law No. 6 of 2023 in conjunction with Government Regulation as a Substitute for Law No. 2 of 2022 on Job Creation and the legal protections under Law No. 1 of 2024 alongside Law No. 19 of 2016 on Information and Electronic Transactions. Utilizing a qualitative approach, the research adopts a statue and conceptual approach to examine the relevant laws and doctrines. The study is desk-based, drawing extensively from secondary legal documents, including legal texts, doctrine, and prior research. The study finds that recent legislative frameworks have facilitated the digital transformation of land deed procedures, endorsing electronic acts with the same legal standing as traditional paper-based acts, provided they meet stipulated requirements for authenticity and accuracy. Key benefits identified include process efficiency, enhanced transparency, and increased document security due to digital signatures and encryption. Despite the progress, several challenges persist, including the need for robust IT infrastructure, stringent data protection, and extensive education and training for stakeholders to adapt to electronic systems. The adoption of electronic systems for creating PPAT acts under the scrutinized legal frameworks offers improved efficiency and security but requires ongoing adjustments and regulatory reinforcements to ensure full legal certainty and public trust.

References: 75 (1983-2023)

Keywords: electronic land transfer acts, PPAT, digital transformation.